

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)
- Anna Yulianti, *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum dan Tercapai Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (Bandung: PT Alumni Penerbit Akademi, 2022)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rudi Indrajaya, Emilia Kontesa dan Rizki Putera Indrajaya, *Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Sinar Grafika, 2019)
- Setiawan, I.K.O, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Jurnal

- Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.
- Ahmad Fanani, and Muhammad Sulthon Zulkarnain. "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2022): 107–18. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.41>.
- Ahmad, Yani, and Rezky A. S. "Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah Untuk Menjamin Ketersediaan Arsip Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Sengketa Pertanahan." *Khazanah-Jurnal Pengembangan Kearsipan* 14, no. 1 (2021): 57–73.
- Amini, Sulasiyah. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1326–40.
- Andriansyah Putra, Reza, and Atik Winanti. "Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

- Anindyati, Farista Dewi, Abdul Haris Farid, and Dwi Wulan Titik Andari. “*Urgensi Autentikasi Dan Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi.*” *Tunas Agraria* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.121>.
- Antonie et al., “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Menjadi Hak Milik.*” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 1 (2025): 364–77.
- Anugrahany, Galuh Dwi, Devan Rohmah, Zidna Faizahtur Nurstyo, and Kuswan Hadji. “*Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Transformasi Sistem Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Magelang.*” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2024): 91–100.
- Aryatie et al., “*Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik).*” *Prespektif Hukum* 22, no. 1 (2022): 1–28.
- Bur, Arifin, and Desi Apriani. “*Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.*” *UIR Law Review* 01, no. 02 (2017): 127–36. <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/952>.
- Darmayanti et al., “*Sosialisasi Peraturan Menteri Aturan ATR No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah*” *JUDIMAS (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2023): 134–40.
- Dewi Rachmawati. “*Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.*” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 6 (2021).
- Erfa, Riswan. “*Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy.*” *Jurnal Pertanahan* 10, no. 1 (2020): 39–59.
- Gunawang, and Mutmainna. “*Dari Kertas Ke Kepastian: Peran Krusial Bukti Surat Dalam Konflik Pertanahan.*” *Jurnal Litigasi Amsir*, no. 2024 : Special Issue (2024): 116–21. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/601>.
- Hafid, Mohamad Arista, Muhammad Irgi Fahrezi, and Dustin Altoffiestin. “*Problematika Konversi Sertifikat Fisik Lama Ke Sertipikat Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan : Studi Kasus Tumpang Tindih Sertifikat Di Pagar Alam , Sumatera Selatan.*” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 521–41.
- Judijanto, Loso. “*Peran Sertifikat Tanah Sebagai Agunan Kredit Di Bank Dalam Meningkatkan Akses Permodalan Dan Investasi Usaha.*” *Borjuis: Journal of Economy* 2, no. 4 (2025): 262–71.

- Juliyanti *et al.*, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi.*” *Jurnal Prefensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 91–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6590.91-96>.
- Kumara *et al.*, “*Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia.*” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 560–63. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4013.560-563>.
- Manthovani, Reda, and Istiqomah. “*Pendaftaran Tanah Di Indonesia.*” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>.
- Maryam Patajai, Sitti. “*Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah.*” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2019): 32–44. <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.25>.
- Mikha Ch. Kaunang. “*Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.*” *Lex Crimen V*, no. 4 (2016): 68–75.
- Nurhayati. “*Fungsi Pendaftaran Tanah Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA Tahun 1960.*” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 2 (2019): 290574. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/ju warta/article/view/410>.
- Nurmiati, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus. “*Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik.*” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 78–112.
- Padusi *et al.*, “*Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.*” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 3–6.
- Prandy A.L. Fanggi. “*Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*” *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2025): 1–9.
- Rahardian Ayu, Saputri. “*Rekontruksi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Nilai Keadilan.*” PhD Thesis Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Ramadhani, Rahmat. “*Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah.*” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 139–57. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1144>.
- Ramadhani, Rahmat. “*Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk*

- Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah.*” Jurnal Sosial Dan Ekonomi 2, no. 1 (2021): 31–40.
- Ranti Alifia Syadilla, and Nathanael Abiel. “*Kekuatan Hukum Hasil Alih Media Sertipikat Elektronik.*” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12 No 6 (2025): 2415–25. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025>.
- Sagoni et al., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah Di Wilayah Pesisir Danau Tempe.*” Legal : Journal Of Law 2, no. 2 (2023): 107–18.
- Salsabila, Tri Novian. *Efektivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik.* Diss. Universitas Kuningan, 2025.
- Satrio Ardi Kartono, and Bha’iq Riza Rakhmatullah. “*Efektivitas Pendaftaran Tanah Sertipikat Elektronik Aset.*” UMPurwokerto Law Review 4, no. 2 (2024): 309–20. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2>.
- Subekti et al., “*Sistem Pendaftaran Tanah Yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.*” Jurnal Komunikasi Hukum 8, no. 2 (2024): 215–28.
- Suryaningsih, and Zainuri. “*Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah.*” Jurnal Jendela Hukum 8, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.1787/f945a7f8-he>.
- Wulan Titik Andari, Dwi, and Dian Aries Mujiburohman. “*Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik.*” Al-Adl : Jurnal Hukum 15, no. 1 (2023): 154–70.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.